

Pelaksanaan Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Sosial Provinsi Banten

Author; Idah Faridah¹, Billy Tejaarief²

¹²Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Serang - Jakarta Km. 03 No. 1B, Pakupatan, Kec. Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten.

Korespondensi penulis : faridaidah704@gmail.com

Abstract. *Technological developments demand the availability of competent human resources through the integration of academic theory and field practice. This study aims to describe the implementation of the Internship Lecture (KKP) in applying knowledge in the Information and Documentation Management Officer (PPID) unit of the Banten Provincial Social Service. The implementation method used is active participation which includes the data planning stage, the implementation of information production, and the periodic evaluation of public content. The findings show that student contributions include compiling narratives for news releases for social activities, managing agency digital media, and field documentation related to the distribution of social assistance and disaster management. Although there were obstacles in the data archiving system and journalistic writing in the initial stage, these challenges were successfully overcome through intensive coordination and technical guidance. The implications of this activity are the realization of strengthened public information transparency as mandated by Law Number 14 of 2008, while equipping students with technical and interpersonal skills relevant to the demands of the professional world of work in government agencies.*

Keywords: *Social Services, Public Information, Internship Lectures, PPID, Banten Province*

Abstrak. Perkembangan teknologi menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten melalui integrasi antara teori akademik dan praktik lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP) dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan pada unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Provinsi Banten. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah partisipasi aktif yang meliputi tahap perencanaan data, pelaksanaan produksi informasi, hingga evaluasi konten publik secara berkala. Temuan menunjukkan bahwa kontribusi mahasiswa mencakup penyusunan narasi rilis berita kegiatan sosial, pengelolaan media digital instansi, serta pendokumentasian lapangan terkait penyaluran bantuan sosial dan penanganan bencana. Meskipun terdapat kendala dalam sistem pengarsipan data dan penulisan jurnalistik pada tahap awal, tantangan tersebut berhasil diatasi melalui koordinasi intensif dan bimbingan teknis. Implikasi dari kegiatan ini adalah terwujudnya penguatan transparansi informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sekaligus membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dan interpersonal yang relevan dengan tuntutan dunia kerja profesional di instansi pemerintahan.

Kata kunci: Dinas Sosial, Informasi Publik, Kuliah Kerja Praktik, PPID, Provinsi Banten

1. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi pun semakin semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang luar biasa membutuhkan sumber daya manusia yang benar benar berkualitas, handal, dan kompeten di bidangnya agar mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia serta mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat (Azkia, 2012).

Kuliah kerja praktek adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang di dunia pendidikan dengan cara terjun langsung untuk mempraktekkan semua teori yang di pelajari di bangku pendidikan. Praktek kerja ini sangat diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, beretos kerja dan berdaya saing tinggi karena bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin berat yaitu kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi, sehingga perlu didukung situasi dan kondisi yang melalui partisipasi semua pihak dalam praktek kerja ini (Alwiyah et al., 2022).

Kuliah kerja praktek KKP juga merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam perguruan tinggi, khususnya dibidang teknik, ilmu social, dan ilmu terapandan, ekonomi, manajemen dll. Kuliah kerja praktek KKP juga bertujuan untuk memberikan pengalaman yang praktis kepada mahasiswa dalam menerapkan teori yang sudah di ajarkan dibangku kuliah ke dalam dunia nyata kerja .

Yang dimana lokasi tempat magang mahasiswa tersebut berada di dinas ketahanan pangan provinsi banten selama kurang lebih 1 bulan mahasiswa melaksanakan kegiatan itu berlangsung. maka dari itu dinas ketahanan pangan juga memiliki keterkaitan antara ekonomi dan dinas dalam kuliah kerja praktek KKP yang di ambil di dinas tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Profil Perusahaan/Instansi

Dinas Sosial Provinsi Banten merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mengelola, mengembangkan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial di wilayah Banten. Sebagai daerah yang memiliki dinamika sosial yang tinggi, mulai dari penanganan kemiskinan, perlindungan anak, pemberdayaan disabilitas, hingga penanganan bencana, Banten membutuhkan lembaga yang mampu merancang strategi dan program pelayanan sosial secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Dinas Sosial hadir sebagai motor penggerak, pengelola, sekaligus fasilitator bagi seluruh pemangku kepentingan kesejahteraan sosial.

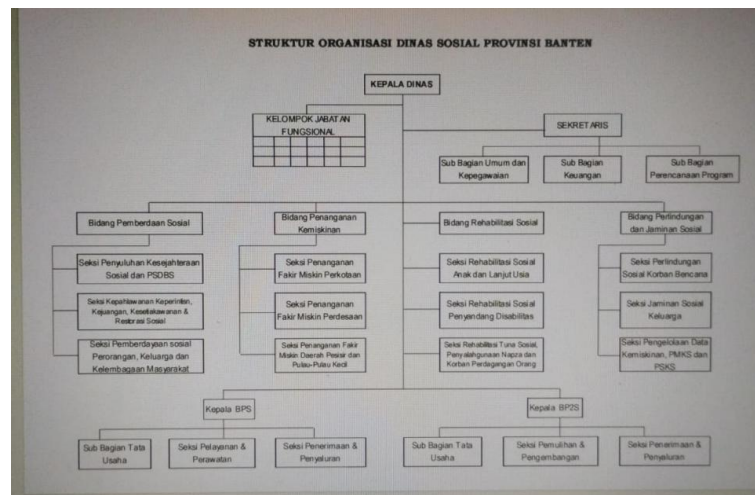
Secara umum, tugas Dinas Sosial Provinsi Banten adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Melalui program kerja yang terarah, dinas ini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial, memperkuat sistem jaminan sosial, serta memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Selain itu, dinas juga berfungsi dalam membina pilar-pilar sosial, mulai dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, hingga komunitas relawan agar mampu berperan aktif dalam mengatasi masalah sosial berbasis kearifan lokal.

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Sosial Provinsi Banten tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga menjalin sinergi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah pusat (Kementerian Sosial), pihak swasta melalui program CSR, maupun lembaga swadaya masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan penanganan masalah sosial di Banten tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kemandirian masyarakat serta menjaga stabilitas sosial daerah.

Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Banten mengacu pada standar pembangunan kesejahteraan sosial nasional, di mana visi instansi adalah: “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif, Berkeadilan, dan Mandiri di Provinsi Banten”. Adapun misi dari Dinas Sosial Provinsi Banten diarahkan kepada pengembangan :

- Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang profesional, mudah dijangkau, dan manusiawi bagi PPKS.
- Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang sinergis dan transparan dalam penanganan kemiskinan serta korban bencana.
- Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial agar tercipta mekanisme operasional yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan aturan pemerintah bahwa semua dinas selain harus memiliki juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Sosial :



Sumber: : (Website Resmi Pemerintah Provinsi Banten, n.d.)

Struktur nya terdiri sebagai berikut :

- Pimpinan: Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten
- Sekretariat: Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sedangkan pada bidang teknis terdiri dari :

- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- Bidang Rehabilitasi Sosial.
- Bidang Pemberdayaan Sosial.
- Bidang Penanganan Fakir Miskin

Selain itu, berikut adalah struktur organisasi PPID pelaksana :



Sumber: : (Website Resmi Pemerintah Provinsi Banten, n.d.)

Penjelasan Peran dalam Struktur (Untuk Analisis Laporan):

- Atasan PPID Pelaksana (Kepala Dinas): Bertanggung jawab penuh atas keseluruhan penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial dan memberikan persetujuan akhir atas informasi yang boleh dipublikasikan atau dikecualikan.
- Ketua PPID (Sekretaris Dinas): Bertugas mengoordinasikan seluruh bidang dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial agar selaras dengan UU No. 14 Tahun 2008.
- Bidang Pelayanan dan Informasi: Menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat yang datang langsung ke kantor (Layanan Desk) maupun melalui portal E-PPID.
- Bidang Pengolahan Data dan Arsip: Bertugas memastikan data seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau Laporan Kinerja (LKLIP) tersedia dalam format yang mudah diakses oleh publik (Sesuai kategori: Berkala, Setiap Saat, atau Serta Merta).
- Bidang Dokumentasi dan Pengaduan: Fokus pada penanganan keberatan apabila ada masyarakat yang tidak puas dengan layanan informasi serta mendokumentasikan setiap kebijakan yang dikeluarkan Dinas.
- Tupoksi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Banten merupakan unit yang memiliki peran strategis dalam memberikan proteksi kepada masyarakat dari risiko

sosial. Unit ini hadir dengan tujuan utama meminimalisir kerentanan sosial dan memastikan masyarakat korban bencana atau kelompok miskin mendapatkan hak jaminannya.

Tupoksi bidang ini mencakup perencanaan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas petugas sosial di lapangan (seperti Tagana dan pendamping PKH). Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar pelayanan perlindungan sosial semakin profesional dan tepat sasaran. Selain itu, bidang ini berperan dalam pengelolaan logistik bantuan dan standarisasi pelayanan bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.

b. Deskripsi Pekerjaan

Sebagai mahasiswa magang yang ditempatkan di Dinas Sosial Provinsi Banten, tugas utama yang dijalankan adalah memberikan dukungan administratif dan teknis. Bentuk bantuan tersebut meliputi pembuatan laporan dinas, penyusunan notulensi rapat koordinasi penanganan masalah sosial, serta melakukan input data pada sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain itu, mahasiswa ditugaskan untuk menyusun surat kedinasan seperti surat undangan rapat pilar-pilar sosial atau nota dinas bantuan sosial sesuai format resmi. Mahasiswa juga dilibatkan dalam memverifikasi data lapangan terkait calon penerima bantuan sosial untuk memastikan ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sosial lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari 4 tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Peningkatan Berkelanjutan. Berikut adalah rinciannya :

a. Perencanaan

Mahasiswa memulai pekerjaan dengan melakukan tahap pengenalan terhadap tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta lingkungan kerja instansi. Dalam tahap perencanaan ini, mahasiswa mengumpulkan informasi mendalam terkait pelaksanaan kegiatan lapangan, seperti waktu, lokasi, pihak yang terlibat, tujuan kegiatan, serta mengumpulkan dokumentasi visual berupa foto atau potongan video. Hal ini dilakukan agar penyusunan narasi rilis memiliki dasar data yang kuat dan akurat sesuai fakta di lapangan.

b. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa mengolah data yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk produk informasi digital. Kegiatan ini meliputi:

- Penyusunan Rilis: Menyusun narasi informatif mengenai berbagai kegiatan instansi, seperti kegiatan gotong royong HKSAN, penyaluran bantuan UEB dan JSK, hingga penanganan bencana banjir dan dapur umum.

- **Produksi Konten Kreatif:** Membuat caption media sosial dan melakukan editing video pendek dengan menyeleksi potongan visual serta menyusun alur agar layak dipublikasikan.
- **Publikasi:** Mengunggah hasil rilis dan konten video melalui media komunikasi resmi seperti Instagram dan website resmi Dinas Sosial Provinsi Banten agar pesan dapat tersampaikan kepada masyarakat luas.

c. Evaluasi

Setelah draf rilis atau konten video selesai dibuat, mahasiswa melakukan tahap evaluasi melalui proses finalisasi. Mahasiswa melakukan revisi terhadap narasi rilis dan memeriksa kembali kesesuaian konten narasi dan video sebelum dipublikasikan.

d. Peningkatan Berkelanjutan

Mahasiswa mendokumentasikan setiap proses kerja sebagai bagian dari penyebaran informasi publik yang berkelanjutan. Hasil rilis yang telah dipublikasikan di website resmi dan laporan realisasi yang telah diperiksa kemudian dijadikan arsip digital instansi. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan informasi oleh PPID agar dapat digunakan kembali sebagai referensi data atau laporan pertanggungjawaban kegiatan di masa mendatang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melaksanakan kegiatan kuliah kerja praktik di Dinas Sosial Provinsi Banten pada tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan 15 Januari 2026. Dalam periode magang tersebut, penulis telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan informasi publik dan administrasi sebagai berikut.

a. Penyusunan dan Publikasi Rilis

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh mahasiswa selama kerja praktik adalah penyusunan rilis kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten. Rilis merupakan naskah informasi resmi yang disusun untuk menyampaikan kegiatan instansi kepada masyarakat melalui media publikasi.

Mahasiswa terlibat dalam penyusunan rilis kegiatan bersama Gubernur Banten yang dilaksanakan di wilayah Pandeglang. Dalam kegiatan ini, mahasiswa membantu menyusun narasi rilis yang memuat informasi mengenai tujuan kegiatan, pihak yang terlibat, lokasi kegiatan, serta hasil yang dicapai. Penyusunan rilis dilakukan dengan memperhatikan kaidah jurnalistik, terutama unsur 5W+1H agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Setelah rilis selesai disusun, mahasiswa juga membantu proses publikasi rilis melalui media resmi Dinas Sosial Provinsi Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan transparansi informasi ke publik.

- **Penyusunan dan Publikasi Rilis Penyaluran Bantuan UEB dan JSK**

Mahasiswa juga terlibat dalam penyusunan rilis kegiatan penyaluran bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEB) dan Jaminan Sosial Keluarga (JSK) di Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperoleh perlindungan sosial.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa membantu menyusun rilis yang berisi informasi mengenai latar belakang kegiatan, sasaran penerima bantuan, bentuk bantuan yang diberikan, serta tujuan program. Selain itu, mahasiswa juga membantu dalam proses dokumentasi kegiatan dan publikasi rilis ke media informasi resmi.

Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai peran Dinas Sosial dalam upaya pengentasan masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial.

- **Penyusunan dan Publikasi Rilis Kegiatan Karang Taruna Provinsi Banten**

Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan adalah penyusunan rilis kegiatan Karang Taruna Provinsi Banten. Dalam kegiatan ini, mahasiswa membantu menyusun rilis yang memuat informasi mengenai peran Karang Taruna dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan pemuda.

Mahasiswa turut membantu proses dokumentasi kegiatan serta penyusunan narasi rilis yang akan dipublikasikan melalui media resmi Dinas Sosial Provinsi Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan sosial serta memperkuat peran Karang Taruna sebagai mitra pemerintah daerah.

- **Penyusunan dan Publikasi Rilis Penanganan Bencana Banjir**

Mahasiswa juga terlibat dalam penyusunan rilis kegiatan penanganan bencana banjir yang terjadi di wilayah Cilegon dan Lebak. Dalam kegiatan ini, mahasiswa membantu menyusun rilis yang memuat informasi mengenai langkah-langkah penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, termasuk pendirian dapur umum dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya peran pemerintah dalam penanganan bencana serta pentingnya penyampaian informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

- **Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemindahan Bayi untuk Proses Adopsi**

Mahasiswa juga mengikuti kegiatan peliputan pemindahan bayi terlantar yang akan diproses untuk diadopsi melalui yayasan yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. Dalam kegiatan ini, mahasiswa membantu proses dokumentasi serta penyusunan rilis kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek etika dan kerahasiaan data.

Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses perlindungan anak serta peran pemerintah dalam menjamin hak-hak anak terlantar. Selain itu, mahasiswa juga belajar mengenai pentingnya kehati-hatian dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan anak dan keluarga.

- **Kegiatan Apel Pagi dan Diskusi Internal**

Selain kegiatan teknis, mahasiswa juga mengikuti kegiatan apel pagi bersama pegawai Dinas Sosial Provinsi Banten. Apel pagi merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan, meningkatkan koordinasi, serta menyampaikan arahan pimpinan kepada seluruh pegawai.

Mahasiswa juga mengikuti diskusi internal yang membahas masalah sosial serta koordinasi antarbidang. Kegiatan ini memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai proses pengambilan keputusan dalam instansi pemerintahan serta pentingnya kerja sama tim dalam pelaksanaan tugas.

b. Kendala dan Cara Mengatasi Kendala

Selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik di Dinas Sosial Provinsi Banten pada Bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mahasiswa mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas. Diantaranya sebagai berikut:

- Pengelolaan data dan arsip kegiatan yang belum tersusun secara sistematis berdasarkan tanggal dan jenis kegiatan, sehingga membutuhkan ketelitian lebih dalam proses pencarian dan pengolahan data .
- Memahami alur kerja PPID pada awal pelaksanaan magang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengalaman mahasiswa dalam memahami mekanisme pelayanan informasi publik, mulai dari proses pengumpulan data, penyusunan rilis, hingga publikasi informasi kepada masyarakat sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- Keterbatasan kemampuan dalam penulisan rilis berita yang sesuai dengan kaidah jurnalistik pemerintahan. Mahasiswa masih perlu menyesuaikan gaya bahasa agar informasi yang disampaikan bersifat objektif, informatif, dan sesuai dengan standar penulisan berita resmi instansi pemerintah.

Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendalanya :

- a. Untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan data dan arsip, mahasiswa berupaya melakukan penataan ulang dokumen berdasarkan tanggal dan jenis kegiatan, sehingga memudahkan dalam proses penyusunan rilis dan laporan kegiatan. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan informasi menjadi lebih sistematis dan tertata.
- b. Dalam mengatasi kendala pemahaman alur kerja PPID, mahasiswa secara aktif melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pembimbing lapangan serta pegawai terkait. Melalui arahan tersebut, mahasiswa dapat memahami prosedur pengelolaan informasi publik sesuai dengan ketentuan instansi.
- c. Untuk meningkatkan kemampuan penulisan rilis, mahasiswa mempelajari contoh rilis yang telah dipublikasikan sebelumnya serta mengikuti arahan dari pembimbing mengenai teknik penulisan berita yang baik dan benar. Hal ini dilakukan agar hasil tulisan memenuhi standar jurnalistik dan layak untuk dipublikasikan di media resmi instansi.

c. Kesenjangan Teori dan Praktik

Perbedaan antara teori dan praktik terlihat pada pelaksanaan kerja di lapangan yang menuntut fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman praktik sangat penting sebagai pelengkap teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada kegiatan KKP di Bidang PPID Dinas Sosial Provinsi Banten memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam pengelolaan informasi publik, mulai dari penyusunan rilis, dokumentasi lapangan, hingga publikasi informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Selain mengasah kemampuan teknis, program ini berhasil membangun aspek nonteknis mahasiswa seperti kedisiplinan, kerja sama tim, dan tanggung jawab sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Sedangkan saran yang dapat mahasiswa berikan adalah sebagai berikut :

- Bagi Instansi: Diharapkan terus meningkatkan efisiensi sistem dokumentasi agar lebih mudah diakses dan memperkuat bimbingan bagi mahasiswa magang.
- Bagi Mahasiswa Selanjutnya: Perlu menyiapkan kemampuan menulis dan pengolahan data sejak dini, serta bersikap lebih proaktif dan berinisiatif selama masa praktik.

- Bagi Perguruan Tinggi: Disarankan untuk memperluas jejaring kerja sama dengan instansi pemerintah dan memberikan pembekalan praktis yang lebih matang sebelum mahasiswa terjun ke lapangan.

DAFTAR REFERENSI

- Alwiyah, A., Sayyida, S., Sunarya, P. A., & Apriliasari, D. (2022). Inovasi Manajemen Pengajaran Judul Kuliah Kerja Praktek (KKP) Berbasis Laravel Framework. *Technomedia Journal*, 7(2), 168–180. <https://doi.org/10.33050/tmj.v7i2.1902>
- Azkiya, S. D. (2012). (*Magang*) Pada Bidang *Kehumasan / Public Relations Pt . Telkom Ucs Regional Iv Jateng & Diy.*
- Bangsa, U. B. (2024). *Laporan Magang.*
- Pemerintah RI. (2008). UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 53.*
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Banten.* (n.d.). Retrieved March 6, 2026, from <https://dinsos.bantenprov.go.id/>